



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pememerintah Daerah dan DPRD;

|                     |  |
|---------------------|--|
| PENANGKAL<br>DAERAH |  |
| KABAG<br>HUKUM      |  |
| ABSTEN              |  |
| BEKDA               |  |

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

|                  |  |
|------------------|--|
| PERANGKAT DAERAH |  |
| KADAG HUKUM      |  |
| ASISTEN          |  |
| REKSA            |  |

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

|                  |   |
|------------------|---|
| PERANGKAI DAERAH |  |
| KABAG HUKUM      |   |
| ASISTEN          |   |
| SEKDA            |   |

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);




20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Amggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

|                  |   |
|------------------|---|
| PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM      |   |
| ASISTEN          |   |
| REKDA            |   |

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan :

a. semula

Rp. 1.116.944.908.905,00

|                                     |     |                      |
|-------------------------------------|-----|----------------------|
| b. bertambah/berkurang              | Rp. | (10.439.627.000,00)  |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp. | 1.106.505.281.905,00 |

## 2. Belanja :

|                                     |     |                      |
|-------------------------------------|-----|----------------------|
| a. semula                           | Rp. | 1.084.712.015.755,00 |
| b. bertambah/berkurang              | Rp. | (9.245.995.917,00)   |
| Jumlah belanja setelah perubahan    | Rp. | 1.075.466.019.838,00 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp. | 31.039.262.067,00    |

## 3. Pembiayaan :

## 1. Penerimaan Pembiayaan

|  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| a. semula                                      | Rp. | 12.400.000.000,00 |
| b. bertambah/berkurang                         | Rp. | (163.891.810,00)  |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 12.236.108.190,00 |

## 2. Pengeluaran pembiayaan

|  |     |                     |
|--|-----|---------------------|
| a. semula  | Rp. | 44.632.893.150,00   |
| b. bertambah/berkurang                           | Rp. | (1.357.522.893,00)  |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  | Rp. | 43.275.370.257,00   |
| Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan        | Rp. | (31.039.262.067,00) |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan | Rp. | 0,00                |

|                     |  |
|---------------------|--|
| PEMANGKAL<br>DAERAH |  |
| KABAG<br>HUKUM      |  |
| ASISTEN             |  |
| REKSA               |  |

Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Rp. 1.118.741.390.095,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari ;

1. Penjabaran Lampiran 1 Perubahan Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah (Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembiayaan Tahun Anggaran 2025);
2. Penjabaran Lampiran 2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rincian Perubahan Anggaran Perubahan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Oragnisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan);
3. Penjabaran Lampiran 3a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa uang yang di terima serta SKPD Pemberi Hibah);
4. Penjabaran Lampiran 3b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa barang yang di terima serta SKPD Pemberi Hibah);
5. Penjabaran Lampiran 4a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa uang yang di terima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial);



6. Penjabaran Lampiran 4b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa barang yang di terima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial);
7. Penjabaran Lampiran 5a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum yang di terima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan);
8. Penjabaran Lampiran 5b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat khusus yang di terima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan);
9. Penjabaran Lampiran 6a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten) Tahun Anggaran 2025;
10. Penjabaran Lampiran 6b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota) Tahun Anggaran 2025;
11. Penjabaran Lampiran 6c. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa) Tahun Anggaran 2025;

|                  |  |
|------------------|--|
| PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM      |  |
| ASISTEN          |  |
| DESA             |  |

12. Penjabaran Lampiran 7 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) Tahun Anggaran 2025;
13. Penjabaran Lampiran 9 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) Tahun Anggaran 2025;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Gorontalo.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

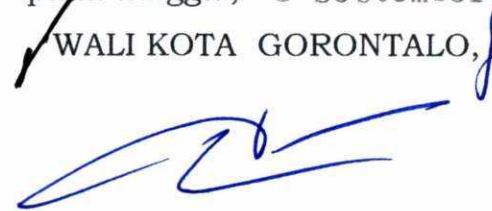
Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal, 8 September 2025  
WALI KOTA GORONTALO,



ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal, 8 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

|           |  |
|-----------|--|
| PERANGKAT |  |
| KABAG     |  |
| REKUM     |  |
| ASISTEN   |  |
| REKSA     |  |

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 1.8,



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 18 Tahun 2025  
Tanggal : 8 September 2025

**KOTA GORONTALO**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| KODE              | URAIAN   | SEBELUM<br>JUMLAH (Rp)    | SESUDAH<br>JUMLAH (Rp)    | SELISIH (Rp)             |
|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1                 | 2  | 3                         | 4                         | 5                        |
| 4                 | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                   |                           |                           |                          |
| 4.1               | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                        | <b>364.506.051.148,00</b> | <b>382.820.592.662,00</b> | <b>18.314.541.514,00</b> |
| 4.1.01            | Pajak Daerah   | 116.404.000.000,00        | 116.404.000.000,00        | 0,00                     |
| 4.1.01.09         | Pajak Reklame  | 6.120.000.000,00          | 6.120.000.000,00          | 0,00                     |
| 4.1.01.09.01      | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/<br>Megatron       | 4.936.800.000,00          | 4.936.800.000,00          | 0,00                     |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/<br>Megatron       | 4.936.800.000,00          | 4.936.800.000,00          | 0,00                     |
| 4.1.01.09.02      | Pajak Reklame Kain   | 1.122.000.000,00          | 1.122.000.000,00          | 0,00                     |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain   | 1.122.000.000,00          | 1.122.000.000,00          | 0,00                     |
| 4.1.01.09.03      | Pajak Reklame Melekat/Stiker                               | 10.200.000,00             | 10.200.000,00             | 0,00                     |
| 4.1.01.09.03.0001 | Pajak Reklame Melekat/Stiker                               | 10.200.000,00             | 10.200.000,00             | 0,00                     |
| 4.1.01.09.05      | Pajak Reklame Berjalan                                     | 51.000.000,00             | 51.000.000,00             | 0,00                     |
| 4.1.01.09.05.0001 | Pajak Reklame Berjalan                                     | 51.000.000,00             | 51.000.000,00             | 0,00                     |
| 4.1.01.11         | Pajak Parkir   | 2.754.000.000,00          | 0,00                      | -2.754.000.000,00        |
| 4.1.01.11.01      | Pajak Parkir   | 2.754.000.000,00          | 0,00                      | -2.754.000.000,00        |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir   | 2.754.000.000,00          | 0,00                      | -2.754.000.000,00        |
| 4.1.01.12         | Pajak Air Tanah  | 100.000.000,00            | 100.000.000,00            | 0,00                     |
| 4.1.01.12.01      | Pajak Air Tanah  | 100.000.000,00            | 100.000.000,00            | 0,00                     |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah  | 100.000.000,00            | 100.000.000,00            | 0,00                     |
| 4.1.01.13         | Pajak Sarang Burung Walet                                  | 50.000.000,00             | 50.000.000,00             | 0,00                     |
| 4.1.01.13.01      | Pajak Sarang Burung Walet                                  | 50.000.000,00             | 50.000.000,00             | 0,00                     |
| 4.1.01.13.01.0001 | Pajak Sarang Burung Walet                                  | 50.000.000,00             | 50.000.000,00             | 0,00                     |
| 4.1.01.14         | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                       | 30.000.000,00             | 30.000.000,00             | 0,00                     |
| 4.1.01.14.04      | Pajak Batu Kapur   | 15.000.000,00             | 15.000.000,00             | 0,00                     |
| 4.1.01.14.04.0001 | Pajak Batu Kapur   | 15.000.000,00             | 15.000.000,00             | 0,00                     |
| 4.1.01.14.23      | Pajak Pasir dan Kerikil                                    | 10.000.000,00             | 10.000.000,00             | 0,00                     |
| 4.1.01.14.23.0001 | Pajak Pasir dan Kerikil                                    | 10.000.000,00             | 10.000.000,00             | 0,00                     |
| 4.1.01.14.37      | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya               | 5.000.000,00              | 5.000.000,00              | 0,00                     |
| 4.1.01.14.37.0001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya               | 5.000.000,00              | 5.000.000,00              | 0,00                     |
| 4.1.01.15         | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan<br>Perkotaan (PBBP2) | 13.770.000.000,00         | 13.770.000.000,00         | 0,00                     |
| 4.1.01.15.01      | PBBP2  | 13.770.000.000,00         | 13.770.000.000,00         | 0,00                     |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2  | 13.770.000.000,00         | 13.770.000.000,00         | 0,00                     |

| KODE              | URAIAN  | SEBELUM JUMLAH (Rp)       | SESUDAH JUMLAH (Rp)       | SELISIH (Rp)             |
|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1                 | 2   | 3                         | 4                         | 5                        |
| 6.2.02.02.01      | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD   | 2.000.000.000,00          | 2.000.000.000,00          | 0,00                     |
| 6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD   | 2.000.000.000,00          | 2.000.000.000,00          | 0,00                     |
| 6.2.03            | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo   | 42.632.893.150,00         | 41.275.370.257,00         | -1.357.522.893,00        |
| 6.2.03.01         | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat  | 42.632.893.150,00         | 41.275.370.257,00         | -1.357.522.893,00        |
| 6.2.03.01.02      | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang | 42.632.893.150,00         | 41.275.370.257,00         | -1.357.522.893,00        |
| 6.2.03.01.02.0001 | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang | 42.632.893.150,00         | 41.275.370.257,00         | -1.357.522.893,00        |
|                   | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>  | <b>44.632.893.150,00</b>  | <b>43.275.370.257,00</b>  | <b>-1.357.522.893,00</b> |
|                   | <b>Pembiayaan Netto</b>   | <b>-32.232.893.150,00</b> | <b>-31.039.262.067,00</b> | <b>1.193.631.083,00</b>  |
| 6.3               | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA



Lampiran II : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 18 Tahun 2025  
Tanggal : 8 September 2025

**KOTA GORONTALO**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,**  
**SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| PENDAPATAN DAERAH |   |                      |                      |                            |             |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| KODE REKENING     | URAIAN  | SEBELUM JUMLAH (Rp)  | SESUDAH JUMLAH (Rp)  | BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) | DASAR HUKUM |
| 4                 | PENDAPATAN DAERAH                                       | 1.116.940.808.905,00 | 1.106.501.181.905,00 | -10.439.627.000,00         |             |
| 4.1               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | 364.501.951.148,00   | 382.816.492.662,00   | 18.314.541.514,00          |             |
| 4.1.01            | Pajak Daerah  | 116.404.000.000,00   | 116.404.000.000,00   | 0,00                       |             |
| 4.1.01.09         | Pajak Reklame   | 6.120.000.000,00     | 6.120.000.000,00     | 0,00                       |             |
| 4.1.01.09.01      | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron       | 4.936.800.000,00     | 4.936.800.000,00     | 0,00                       |             |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron       | 4.936.800.000,00     | 4.936.800.000,00     | 0,00                       |             |
| 4.1.01.09.02      | Pajak Reklame Kain                                      | 1.122.000.000,00     | 1.122.000.000,00     | 0,00                       |             |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain                                      | 1.122.000.000,00     | 1.122.000.000,00     | 0,00                       |             |
| 4.1.01.09.03      | Pajak Reklame Melekat/Stiker                            | 10.200.000,00        | 10.200.000,00        | 0,00                       |             |
| 4.1.01.09.03.0001 | Pajak Reklame Melekat/Stiker                            | 10.200.000,00        | 10.200.000,00        | 0,00                       |             |
| 4.1.01.09.05      | Pajak Reklame Berjalan                                  | 51.000.000,00        | 51.000.000,00        | 0,00                       |             |
| 4.1.01.09.05.0001 | Pajak Reklame Berjalan                                  | 51.000.000,00        | 51.000.000,00        | 0,00                       |             |
| 4.1.01.11         | Pajak Parkir  | 2.754.000.000,00     | 0,00                 | -2.754.000.000,00          |             |
| 4.1.01.11.01      | Pajak Parkir  | 2.754.000.000,00     | 0,00                 | -2.754.000.000,00          |             |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir  | 2.754.000.000,00     | 0,00                 | -2.754.000.000,00          |             |
| 4.1.01.12         | Pajak Air Tanah   | 100.000.000,00       | 100.000.000,00       | 0,00                       |             |
| 4.1.01.12.01      | Pajak Air Tanah   | 100.000.000,00       | 100.000.000,00       | 0,00                       |             |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah   | 100.000.000,00       | 100.000.000,00       | 0,00                       |             |
| 4.1.01.13         | Pajak Sarang Burung Walet                               | 50.000.000,00        | 50.000.000,00        | 0,00                       |             |
| 4.1.01.13.01      | Pajak Sarang Burung Walet                               | 50.000.000,00        | 50.000.000,00        | 0,00                       |             |
| 4.1.01.13.01.0001 | Pajak Sarang Burung Walet                               | 50.000.000,00        | 50.000.000,00        | 0,00                       |             |
| 4.1.01.14         | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                    | 30.000.000,00        | 30.000.000,00        | 0,00                       |             |
| 4.1.01.14.04      | Pajak Batu Kapur  | 15.000.000,00        | 15.000.000,00        | 0,00                       |             |
| 4.1.01.14.04.0001 | Pajak Batu Kapur  | 15.000.000,00        | 15.000.000,00        | 0,00                       |             |
| 4.1.01.14.23      | Pajak Pasir dan Kerikil                                 | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 0,00                       |             |
| 4.1.01.14.23.0001 | Pajak Pasir dan Kerikil                                 | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 0,00                       |             |
| 4.1.01.14.37      | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya            | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 0,00                       |             |
| 4.1.01.14.37.0001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya            | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 0,00                       |             |
| 4.1.01.15         | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 13.770.000.000,00    | 13.770.000.000,00    | 0,00                       |             |

|                   |   |                   |                   |                   |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.02.02.01      | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD   | 2.000.000.000,00  | 2.000.000.000,00  | 0,00              |
| 6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD   | 2.000.000.000,00  | 2.000.000.000,00  | 0,00              |
| 6.2.03            | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo   | 42.632.893.150,00 | 41.275.370.257,00 | -1.357.522.893,00 |
| 6.2.03.01         | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat  | 42.632.893.150,00 | 41.275.370.257,00 | -1.357.522.893,00 |
| 6.2.03.01.02      | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang | 42.632.893.150,00 | 41.275.370.257,00 | -1.357.522.893,00 |
| 6.2.03.01.02.0001 | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang | 42.632.893.150,00 | 41.275.370.257,00 | -1.357.522.893,00 |

WALI KOTA GORONTALO



ADHAN DAMBEA



Hibah Berupa Uang

Lampiran IIIa : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 18 Tahun 2025

Tanggal : 8 September 2025

**KOTA GORONTALO**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO | NAMA PENERIMA                                      | ALAMAT PENERIMA  | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|----|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
|    | <b>Dinas Pendidikan</b>                            |  |                     |                     |              |
|    | <b>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</b> |  |                     |                     |              |
| 1  | SD Sains Al-Irsyad Al-Islamiyyah                   | Jl. Moh. Yamin, Kel. Limba B,  | 11.040.000,00       | 11.040.000,00       | 0,00         |
| 2  | SD Kharisma Bunga Bangsa                           | Jl. Arif Rahman Hakim  | 5.400.000,00        | 5.400.000,00        | 0,00         |
| 3  | SD ISLAM AT TAMYIZ                                 | Sipatana   | 13.080.000,00       | 13.080.000,00       | 0,00         |
| 4  | SD Sukma Nusa Bangsa                               | Jl. Arif Rahman Hakim  | 1.920.000,00        | 1.920.000,00        | 0,00         |
| 5  | SDIT Az-Zahra                                      | Jln. Madura No. 38<br>Kel. Pulubala, Kec.<br>Kota Tengah,<br>Gorontalo | 25.800.000,00       | 25.800.000,00       | 0,00         |
| 6  | SDIT QURRATU A"YUN                                 | JL. PANGERAN<br>HIDAYAT II   | 21.120.000,00       | 21.120.000,00       | 0,00         |
| 7  | SD Brilll Kids Leadership Elementary School        | Jl. Dewi Sartika   | 7.680.000,00        | 7.680.000,00        | 0,00         |
| 8  | SD Islam Al Hijrah                                 | Jl. Prof John Aryo<br>Katili   | 51.720.000,00       | 51.720.000,00       | 0,00         |
| 9  | SD MUHAMMADIYAH KOTA UTARA                         | JL. BRIGJEN PIOLA<br>ISA   | 16.200.000,00       | 16.200.000,00       | 0,00         |
| 10 | SD KATOLIK SANTA MARIA                             | Jl.Sutoyo no.16  | 30.720.000,00       | 30.720.000,00       | 0,00         |
| 11 | SD Islam Al Azhar 43                               | Jl. Sultan Botutihe  | 10.080.000,00       | 10.080.000,00       | 0,00         |
| 12 | SD LABORATOIUM UNG                                 |  | 49.200.000,00       | 49.200.000,00       | 0,00         |
| 13 | SD Integral Hidayatullah                           | Jl. Pesantren  | 11.640.000,00       | 11.640.000,00       | 0,00         |
| 14 | SD KRISTEN MAESA                                   | JL. P<br>KALENGKONGAN  | 3.600.000,00        | 3.600.000,00        | 0,00         |

| NO | NAMA PENERIMA  | ALAMAT PENERIMA | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp)  |
|----|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|
|    | JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |                 | 642.858.303,00      | 692.858.303,00      | 50.000.000,00 |

WALI KOTA GORONTALO



ADHAN DAMBEA



Hibah Berupa Barang/Jasa

Lampiran IIIb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 18 Tahun 2025

Tanggal : 8 September 2025

**KOTA GORONTALO**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO   | NAMA PENERIMA   | ALAMAT PENERIMA          | BENTUK   | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp)   | SELISIH (Rp)          |
|--|---|--------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Dinas Pendidikan  |                          |  |                     |                       |                       |
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD |                          |  |                     |                       |                       |
| 1  | TK RAUDLATUL JANNAH II  | Jl. Prof. Dr. HB. Jassin | REHABILITASI RUANG KELAS TK RAUDHATUL JANNAH II_DIKNAS2025 | 0,00                | 400.000.000,00        | 400.000.000,00        |
| 2  | TK KEMALA BHAYANGKARI   | Jl. P. Kalengkonganm     | REHABILITASI PAGAR TK BHAYANGKARI_DIKNAS2025               | 0,00                | 200.000.000,00        | 200.000.000,00        |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>          |   |                          |  | <b>0,00</b>         | <b>600.000.000,00</b> | <b>600.000.000,00</b> |
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                 |                          |  |                     |                       |                       |
| 3  | TK RAUDLATUL JANNAH II  | Jl. Prof. Dr. HB. Jassin | REHABILITASI RUANG KELAS TK RAUDHATUL JANNAH II_DIKNAS2025 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>          |   |                          |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan</b> |   |                          |  | <b>0,00</b>         | <b>600.000.000,00</b> | <b>600.000.000,00</b> |

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA



**KOTA GORONTALO**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO | NAMA PENERIMA   | ALAMAT PENERIMA            | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|----|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|    | <b>Dinas Pendidikan</b>   |                            |                     |                     |              |
|    | <b>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</b> |                            |                     |                     |              |
| 1  | ABDUL AZIS RAHMAN   | Jl. Mayor Dullah           | 0,00                | 800.000,00          | 800.000,00   |
| 2  | HAPSAH USMAN POIYO  | SDN NO. 42<br>HULONTALANGI | 0,00                | 800.000,00          | 800.000,00   |
| 3  | MERIYANA LAMUSU   | Jl. Raja Eyato             | 0,00                | 800.000,00          | 800.000,00   |
| 4  | NURSAVIRA DAMA  | JLN SAWAH BESAR            | 0,00                | 800.000,00          | 800.000,00   |
| 5  | NILAWATI KARIM, S.Pd.I  | Jl. Palma                  | 0,00                | 800.000,00          | 800.000,00   |
| 6  | FIGRIANTY SUGA  | SDN NO. 26 KOTA<br>SELATAN | 0,00                | 800.000,00          | 800.000,00   |
| 7  | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu                                   |                            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 8  | NINDRA MARETENG   |                            | 0,00                | 800.000,00          | 800.000,00   |
| 9  | ASRA MURSALI  | JL MANDALA                 | 0,00                | 800.000,00          | 800.000,00   |
| 10 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu                                   |                            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11 | KARSUM AKUBA  | SDN NO. 31 KOTA<br>SELATAN | 0,00                | 800.000,00          | 800.000,00   |
| 12 | ASRA MURSALI  |                            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 13 | ADAM ABDULLA IIF ABDJULU  |                            | 0,00                | 800.000,00          | 800.000,00   |
| 14 | FAISAL Y. HUNOWU  | SDN NO. 28 KOTA<br>SELATAN | 0,00                | 800.000,00          | 800.000,00   |
| 15 | LOLAN HUSAIN  | SDN NO. 69 KOTA<br>TENGAH  | 0,00                | 800.000,00          | 800.000,00   |
| 16 | MISRAWATI HADJU   | JL. PANCA KRIDA            | 0,00                | 800.000,00          | 800.000,00   |

| NO | NAMA PENERIMA  | ALAMAT PENERIMA | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp)   |
|----|--|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|
|    | JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosiai dan Pemberdayaan Masyarakat |                 | 835.000.000,00      | 760.000.000,00      | -75.000.000,00 |

WALI KOTA GORONTALO



ADHAN DAMBEA



**KOTA GORONTALO**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO  | NAMA PENERIMA   | ALAMAT PENERIMA         | BENTUK           | SEBELUM JUMLAH (Rp)   | SESUDAH JUMLAH (Rp)   | SELISIH (Rp)          |
|---|---|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | <b>Dinas Pendidikan</b>   |                         |                  |                       |                       |                       |
|   | <b>Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik</b>                     |                         |                  |                       |                       |                       |
| 1   | SDN NO. 6 KOTA BARAT  | Jl. Kancil              | SEPATU SD (P1)   | 86.913.000,00         | 86.913.000,00         | 0,00                  |
| 2   | SDN NO 10.KOTA BARAT  | JALAN RAMBUTAN          | SERAGAM SD (P1)  | 112.752.000,00        | 112.752.000,00        | 0,00                  |
| 3   | SDN 97 KOTA UTARA   |                         | SEPATU SD (P1)   | 0,00                  | 116.550.000,00        | 116.550.000,00        |
| 4   | SDN 97 KOTA UTARA   |                         | SERAGAM SD (P1)  | 0,00                  | 151.200.000,00        | 151.200.000,00        |
| <b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>          |   |                         |                  | <b>199.665.000,00</b> | <b>467.415.000,00</b> | <b>267.750.000,00</b> |
|   | <b>Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik</b>                     |                         |                  |                       |                       |                       |
| 5   | SMP NEGERI 2 GORONTALO  | JL. NBUDI UTOMO NO. 298 | SEPATU SMP (P1)  | 0,00                  | 127.800.000,00        | 127.800.000,00        |
| 6   | SMP NEGERI 2 GORONTALO  | JL. NBUDI UTOMO NO. 298 | SERAGAM SMP (P1) | 119.250.000,00        | 119.250.000,00        | 0,00                  |
| 7   | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu |                         | SERAGAM SMP (P1) | 0,00                  | 159.750.000,00        | 159.750.000,00        |
| 8   | SMP NEGERI 2 GORONTALO  | JL. NBUDI UTOMO NO. 298 | SEPATU SMP (P1)  | 95.400.000,00         | 95.400.000,00         | 0,00                  |
| <b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>          |   |                         |                  | <b>214.650.000,00</b> | <b>502.200.000,00</b> | <b>287.550.000,00</b> |
| <b>JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Pendidikan</b> |   |                         |                  | <b>414.315.000,00</b> | <b>969.615.000,00</b> | <b>555.300.000,00</b> |

WALI KOTA GORONTALO  


ADHAN DAMBEA



**KOTA GORONTALO**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN**  
**BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO                  | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | SEBELUM<br>JUMLAH (Rp) | SESUDAH<br>JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---------------------|---------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------|
| DATA LAPORAN KOSONG |               |                 |                        |                        |              |

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA



**KOTA GORONTALO**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN**  
**BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO  | NAMA PENERIMA   | ALAMAT PENERIMA | SEBELUM JUMLAH (Rp)     | SESUDAH JUMLAH (Rp)   | SELISIH (Rp)           |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|   | <b>Badan Keuangan</b>                                       |                 |                         |                       |                        |
|   | <b>Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</b> |                 |                         |                       |                        |
| 1   | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi  |                 | 0,00                    | 600.000.000,00        | 600.000.000,00         |
| 2   | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi  |                 | 1.200.000.000,00        | 0,00                  | -1.200.000.000,00      |
| <b>JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN</b>        |   |                 | <b>1.200.000.000,00</b> | <b>600.000.000,00</b> | <b>-600.000.000,00</b> |
| <b>JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Keuangan</b> |   |                 | <b>1.200.000.000,00</b> | <b>600.000.000,00</b> | <b>-600.000.000,00</b> |

/ WALI KOTA GORONTALO  


ADHAN DAMBEA



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

Lampiran VIa : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 18 Tahun 2025

Tanggal : 8 September 2025

**KOTA GORONTALO**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO                  | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | SEBELUM<br>JUMLAH (Rp) | SESUDAH<br>JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---------------------|---------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------|
| DATA LAPORAN KOSONG |               |                 |                        |                        |              |

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

Lampiran VIb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 18 Tahun 2025

Tanggal : 8 September 2025

**KOTA GORONTALO**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO                  | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | SEBELUM<br>JUMLAH (Rp) | SESUDAH<br>JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---------------------|---------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------|
| DATA LAPORAN KOSONG |               |                 |                        |                        |              |

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa

Lampiran VIc : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 18 Tahun 2025

Tanggal : 8 September 2025

**KOTA GORONTALO**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO                  | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | SEBELUM<br>JUMLAH (Rp) | SESUDAH<br>JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---------------------|---------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------|
| DATA LAPORAN KOSONG |               |                 |                        |                        |              |

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA



Lampiran VII : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 18 Tahun 2025  
Tanggal : 8 September 2025

**KOTA GORONTALO**  
**RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS**  
**MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,**  
**KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

| KODE REKENING       | URAIAN | JUMLAH          |                 | SELISIH | SUMBER DANA | LOKASI |
|---------------------|--------|-----------------|-----------------|---------|-------------|--------|
|                     |        | SEBELUM<br>(Rp) | SESUDAH<br>(Rp) |         |             |        |
| 1                   | 2      | 3               | 4               | 5       | 6           | 7      |
| DATA LAPORAN KOSONG |        |                 |                 |         |             |        |

WALI KOTA GORONTALO  
  
ADHAN DAMBEA



Lampiran IX : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 18 Tahun 2025  
Tanggal : 8 September 2025

**KOTA GORONTALO**  
**RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR**  
**MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,**  
**KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH       |              | SELISIH | SUMBER DANA | LOKASI |
|---------------|--------|--------------|--------------|---------|-------------|--------|
|               |        | SEBELUM (Rp) | SESUDAH (Rp) |         |             |        |
| 1             | 2      | 3            | 4            | 5       | 6           | 7      |

DATA LAPORAN KOSONG

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA